



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

SEKRETARIAT DAERAH

Jayapura, 11 Juni 2020

Nomor : 188.3/6752/SET
Lampiran : 7 (tujuh) berkas
Perihal : Penyampaian Raperdasi dan
Raperdasus

K e p a d a
Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Papua

di -

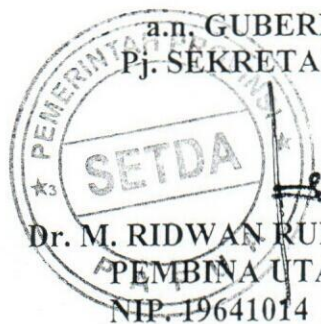
JAYAPURA

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 10/DPRP/2019 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Untuk Ditetapkan Menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020.

Sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) dimaksud, Pihak Eksekutif merencanakan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Provinsi Papua untuk dibahas dalam Masa Sidang DPRD Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Raperdasi Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
2. Raperdasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
3. Raperdasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Raperdasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Raperdasi Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti.
6. Raperdasus Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
7. Raperdasus Kampung Adat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR PAPUA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641014 198603 1 016

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura Sebagai Laporan.
2. Para Asisten SETDA Provinsi Papua di Jayapura.
3. Ketua Bapemperda DPRD di Jayapura.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NOMOR : 10/DPRP/2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TERHADAP
RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUATAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, telah dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
- b. bahwa untuk memenuhi huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat Jo. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2008 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : 1. Pidato Penjelasan Kepala Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-1 DPR Papua tanggal, 25 Oktober 2019;

2. Laporan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Papua yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-2 tanggal 28 Oktober 2019;

3. Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 tanggal, 28 Oktober 2019;

4. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-4 tanggal, 28 Oktober 2019;

5. Laporan Komisi-Komisi DPR Papua yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-5 tanggal, 29 Oktober 2019;

6. Laporan Pendapat Fraksi DPR Papua, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 tanggal, 29 Oktober 2019;

Memperhatikan pula : Permusyawaratan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Rapat Paripurna ke-6 tanggal 29 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlampir.

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

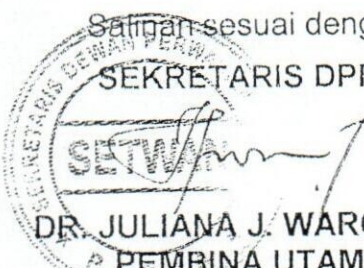
Ditetapkan di : Jayapura;
Pada tanggal : 29 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

KETUA,

Ttd

Dr. YUNUS WONDA, SH., MH

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPR PAPUA,
DR. JULIANA J. WAROMI, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660314 198603 2 012

Pemerintah Provinsi Papua
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020

No Urut	Instansi/SKPD Pemrakarsa	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Target Pentampaan	Keterangan
					Baru	Usah			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua	RAPERDASI	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020.	- Pendapatan Daerah. - Belanja Daerah. - Pembiayaan Daerah.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	
2	Dinas Pariwisata Provinsi Papua.	RAPERDASI	Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah	- Wewenang di bidang kepariwisataan. - Persyaratan, Permodalan dan Perizinan. - Peranserta Masyarakat. - Pembinaan. - Pelaporan. - Ketentuan Pidana. - Ketentuan Penyidikan. - Ketentuan Peraltihan - Ketentuan Penutup.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. - Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	
3	Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua	RAPERDASI	Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Kabupaten/Kota.	- Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan - Pembagian Kewenangan Pemerintah Provinsi Dengan Kabupaten/Kota - Pengalihan Aset - Penyelenggaraan Urusan Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua - Supervisi, Pengawasan dan Evaluasi	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	
4	Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua	RAPERDASUS	Hak Ulayat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.	- Keberadaan Hak Ulayat. - Penetapan Hak Ulayat. - Pengalihan Hak Ulayat. - Kewajiban Pemegang Hak Ulayat. - Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat.	-	Usah	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	
5	Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua	RAPERDASUS	Kampung Adat.	- Keberadaan Kampung dan Kampung Adat. - Indikator Kampung Adat dan Masyarakat Hukum Adat. - Kewenangan Kampung Adat. - Susunan Kelembagaan Kampung Adat. - Kewenangan Kepala Kampung Adat. - Pengisian Jabatan Kepala Kampung Adat.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Papua	RAPERDASUS	Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.	- Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. - Tugas dan Wewenang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Penyelesaian Sengketa. - Pengawasan	-	Ubah	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	
7	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua	RAPERDASI	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	- Tujuan, Sasaran, Strategi dan Skenario. - Kebijakan Daerah. - Indikator dan Target Capaian. - Pengawasan. - Evaluasi.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	
8	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua	RAPERDASI	Pembangunan Infrastruktur Dengan Penganggaran Tahun Jamak.	- Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup. - Pembangunan Yang Dibiayai Dengan Penganggaran Tahun Jamak. - Pelaksanaan dan Penganggaran Tahun Jamak.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.	2020	
9	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Papua.	RAPERDASI	Pencabutan Perdesi Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pendirian Perseroan Terbatas PT. Papua Grace Airlines.	- Pembentukan Perseroan dan Tempat Kedudukan. - Badan Usaha dan Modal Perseroan. - Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi. - Laba dan Investasi. - Resiko dan Kompensasi. - Anggaran Dasar.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	
10	Badan KESSANGPOL Provinsi Papua.	RAPERDASUS	Pengawasan Sosial.	- Tujuan. - Bentuk Pengawasan. - Tata Cara Pengawasan. - Tindak Lanjut Pengawasan. - Tindak Lanjut Temuan.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua.	RAPERDASI	Pemberian Nama Papua Bangkit Pada Jembatan mamad-motokam Kota Jayapura.	Pemberian Nama	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.	2020	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENTAMPAHAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Biro Perencanaan dan SDA SETDA Provinsi Papua.	RAPERDASI	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Mandiri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti.	- Maksud dan Tujuan. - Perubahan Badan Hukum. - Nama dan Tempat Kedudukan. - Bidang Usaha. - Modal. - Saham-saham. - RUPS.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	2020	
13	Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua.	RAPERDASUS	Lambang Daerah.	- Jenis Kedudukan dan Fungsi Lambang Daerah. - Desain Lambang Daerah. - Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah. - Bentuk Bendera Daerah. - Lagu Daerah.	Baru	-	- Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.	2020	
14	BPKAD Provinsi Papua.	RAPERDASI	Bantuan Luar Negeri.	- Bentuk Penerimaan Bantuan (Uang Tunai/Program) - Penggunaan Bantuan. - Pengawasan (Pengawasan Umum dan Teknis).	Baru	-	- Pasal 35 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.	2020	
15	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.	RAPERDASI	Pelaksanaan Tugas Kepolisian Di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman.	- Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian Daerah. - Feraganaan Ketertiban dan Ketenteraman (Memperhatikan Kearifan Budaya, Pelaksanaan-nya Melibatkan Masyarakat). - Kawajiban (Menjamin Ketertiban dan Ketenteraman Kehidupan Masyarakat). - Peran Serta Masyarakat (Memelihara Ketertiban dan Ketenteraman Lingkungan). - Pengawasan Dilakukan Oleh KAPOLDI.	Baru	-	- Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.	2020	
16	BPKAD Provinsi Papua.	RAPERDASI	Peraturan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Khusus Di Provinsi Papua.	- Salanja Keuangan Khusus. - Penganggaran Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. - Biaya Penunjang Operasional Khusus. - Salanja Penunjang Kegiatan Khusus. - Salanja Ferjalanan Dires Khusus Dalam Daerah. - Bantuan Sosial.	-	Ubah	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2020	
17	BPKAD Provinsi Papua.	RAPERDASI	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	- Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah. - Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan. - Pengadaan dan Penjualan. - Pengelolaan, Penatausahaan dan Pemertanian. - Pengamanan dan Peneliharaan.	-	Ubah	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.	2020	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Dinas Kehutanan Provinsi Papua.	RAPERDASUS	Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.	- Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. - Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. - Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. - Pengelolaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. - Kewajiban Pemegang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. - Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.	-	Ubah	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.		
19	BPKAD Provinsi Papua.	RAPERDASI	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	- Ruang Lingkup. - Kekayaan Pengelolaan Keuangan Daerah. - Asas Umum dan Struktur APBD. - Penyusunan Rancangan APBD. - Penetapan APBD. - Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD. - Akuntansi Keuangan Daerah.	-	Ubah	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.		
20	BAPPENDA Provinsi Papua.	RAPERDASI	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.	- Objek dan Golongan Retribusi. - Retribusi Jasa Umum. - Retribusi Jasa Usaha. - Retribusi Perizinan Terbatas. - Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan. - Pendaftaran dan Pendaftaran.	-	Ubah	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		
21	Dinas ESDM Provinsi Papua.	RAPERDASI	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.	- Kewenangan. - Wilayah Pertambangan. - Izin Usaha Pertambangan. - IUP Pertambangan Rakyat. - Pembinaan dan Pengawasan.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.		
22	BAPPENDA Provinsi Papua.	RAPERDASI	Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.	- Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. - Kriteria. - Dasar Penilaian. - Jenis Baru Kegiatan Usaha Yang Mendapatkan Insentif dan Kemudahan. - Bentuk Insentif dan Kemudahan. - Pembinaan dan Pengawasan.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.		

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMERAKSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS			PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPALAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
23	DPR Papua	RAPERDASI	Pengelolaan Kehutanan di Provinsi Papua	-	Baru	-	-	-	2020	
24	DPR Papua	RAPERDASI	Perlindungan dan Pengembangan Danau di Provinsi Papua	-	Baru	-	-	-	2020	
25	DPR Papua	RAPERDASI	Standarisasi Kompensasi Pembangunan Jalan di Provinsi Papua	-	Baru	-	-	-	2020	
26	DPR Papua	RAPERDASI	Perlindungan dan Pengembangan Pengusaha Asli Papua	-	Baru	-	-	-	2020	
27	DPR Papua	PAPERDASUS	Revisi Perdasus tentang Kesiadayaan di Provinsi Papua	- Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	Ubah	-	-	2020	
28	DPR Papua	PAPERDASUS	Sendera dan Lambang Daerah di Provinsi Papua	-	Baru	-	-	-	2020	
29	DPR Papua	RAPERDASI	Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Papua	-	Baru	-	-	-	2020	
30	DPR Papua	RAPERDASI	Raperdasus tentang Bantuan Lembaga Pendidikan Swasta di Provinsi Papua	-	Baru	-	-	-	2020	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
KETUA

TTD

DR. YUNUS WONDA, SH., MH.

